

SINOPSIS

Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Kesenjangan yang masih terjadi diakibatkan oleh terdapatnya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya. Anggaran Responsif Gender (ARG) bukanlah anggaran yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, tetapi ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan pada setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dalam kesetaraan gender di pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Dalam sosialisasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di BKK PP dan KB Kabupaten Bantul belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman oleh para birokrat yang terdapat pada instansi yang terkait. Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian, tentang bagaimana "**Sosialisasi Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Oleh BKKPPKB Tahun 2010-2011**"

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif guna untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sosialisasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Bantul. Sumber-sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara (interview) dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara mendeskriptifkan data yang ada dengan tulisan atau rangkaian kata-kata secara sistematis dan kemudian diinterpretasi atau ditafsirkan serta kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian di lapangan bahwasanya sosialisasi Anggaran Responsif Gender di pemerintah Kabupaten Bantul oleh BKKPPKB telah dilaksanakan tetapi belum dapat berjalan dengan maksimal. Adapun bentuk sosialisasi terhadap Anggaran Responsif Gender yaitu dengan melakukan seminar, advokasi, rapat kerja, workshop, dll. faktor pendukungnya antara lain adanya Surat Edaran Gubernur No 463/0494 untuk implementasi anggaran responsif gender selain itu, adanya antusiasme peserta pada setiap kegiatan terkait dengan sosialisasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Bantul. faktor penghambatnya antara lain, keterbatasannya para birokrat yang kurang memahami tentang pelaksanaan Anggaran Responsif Gender yang tepat.

Kesimpulannya yaitu sosialisasi yang dilakukan terhadap ARG di BKKPPKB Tahun 2010-2011 sudah dilaksanakan, meskipun belum berjalan secara maksimal sehingga saran yang ditawarkan perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara intens terhadap pelaksanaan